

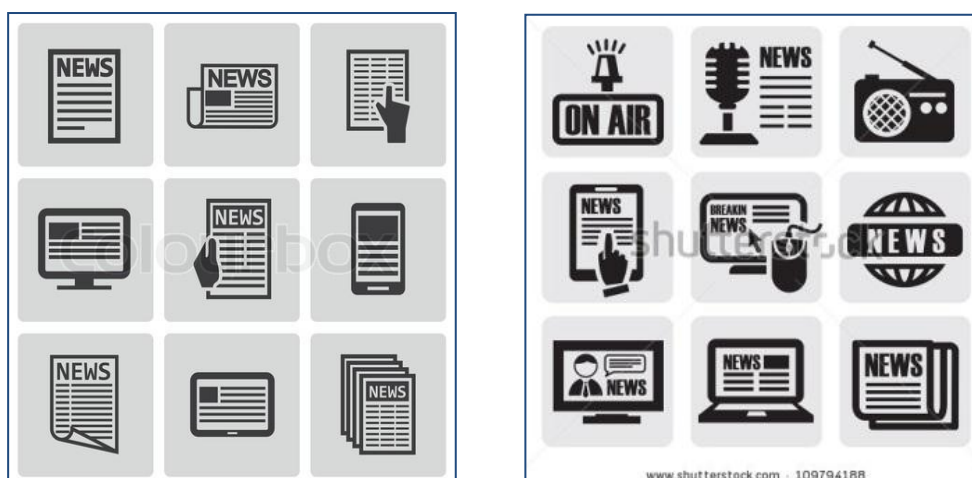


**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Ekonomi

Senin, 15 Juni 2015



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2015**

Daftar Isi

1. 29 BUMN MINTA JATAH Rp 34 TRILIYUN (*Media Cetak Bisnis Indonesia*)
2. ASEAN TERGANTUNG INTEGRASI EKONOMI (*Media Cetak Bisnis Indonesia*)
3. DEFISIT APBN (*Media Cetak Harian Ekonomi Neraca*)
4. FAO : 19 JUTA PENDUDUK KELAPARAN (*Media Cetak Harian Ekonomi Neraca*)
5. INFRASTRUKTUR PERLU DUKUNGAN POSITIF (*Media Cetak Harian Ekonomi Neraca*)

Bisnis Indonesia

REFERENSI BISNIS TERPERCAYA

NAVIGASI
BISNIS
TERPERCAYA

SENIN
15 JUNI 2015

TAMBAHAN MODAL

29 BUMN Minta Jatah Rp43 Triliun

JAKARTA — Dengan dalih mewujudkan agenda pemerintahan Joko Widodo, 29 BUMN meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp43,12 triliun dalam Rancangan APBN 2016.

Yuda Hardiyanto
yuda.hardiyanto@bisnis.com.id

Berdasarkan salinan surat Kementerian BUMN yang diperoleh Bisnis, PMN itu terdiri dari PMN tunai Rp39,45 triliun untuk 25 BUMN dan PMN non-tunai Rp3,67 triliun untuk delapan BUMN. Sebanyak tiga perusahaan pejabat meminta PMN tunai dan non-tunai sekaligus.

Usulan PMN itu lebih rendah dibandingkan dengan usulan pemerintah dalam APBN Perubahan 2015 senilai Rp48 triliun. Dalam APBN-P 2015

yang disetujui pada Februari 2015, DPR hanya menyetujui pemberian PMN senilai Rp39,92 triliun.

Dalam surat yang disampaikan kepada Komisi VI DPR itu, Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan BUMN dan anak perusahaan memerlukan dukungan pemerintah berupa tambahan PMN untuk melakukan investasi dalam rangka mendukung peran sebagai agen pembangunan.

"Sekaligus memperbaiki atau memperkuat permodalan sehingga dapat me-leverage kemampuan pendanaannya," tulis Rini dalam surat ber-

nomor S-330/MBU/06/2015 tersebut seperti dikutip pada Minggu (14/6).

Rini menjelaskan BUMN dan anak perusahaan diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung terwujudnya program-program pemerintah khususnya yang menjadi agenda prioritas seperti yang tertuang dalam konsep Nawacita yang dibuat oleh Joko Widodo.

Agenda prioritas itu antara lain mewujudkan kedaulatan energi, membangun infrastruktur dan maritim, mendukung industri pertahanan dan keamanan, mendukung industri kegigihan dan penguatan sektor keuangan.

Rini memaparkan usulan PMN itu telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan selaku kementerian yang menyusun RAPBN. Sampai saat ini, Rini masih merahasiakan usulan PMN ini dari publik.

BUMN yang meminta PMN paling besar adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) senilai Rp8 triliun. Dalam APBN Perubahan 2015, PLN awalnya tidak masuk ke dalam daftar penerima PMN namun kemudian disetujui menerima PMN Rp5 triliun pada hari-hari terakhir pengambilan keputusan.

BUMN lain yang diusulkan memperoleh PMN dengan jumlah terbesar kedua adalah PT Hutama Karya (Persero). Pada APBN-P 2015, perusahaan yang ditugaskan menggarap mega-proyek Trans Sumatera itu disetujui memperoleh Rp3,6 triliun.

Dari 29 BUMN yang diusulkan menerima PMN, 4 BUMN di antaranya telah melantai di Bursa Efek Indonesia yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang meminta Rp1,25 triliun, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Rp2 triliun, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp3 triliun dan PT Krakatau Steel

(Persero) Tbk Rp1,5 triliun (tunai) dan Rp956 miliar (non-tunai).

Dalam APBN-P 2015, perusahaan produsen baja itu sempat diusulkan oleh pemerintah untuk mendapatkan PMN non-tunai namun Komisi VI DPR menolak memasukkan emiten berkode saham KRAS tersebut ke dalam daftar penerima.

Penyertaan modal yang diberikan kepada perusahaan terbuka itu harus dilakukan menggunakan cara *right issue* atau penawaran saham baru.

DIPELAJARI DPR

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan mengatakan pembayarnya akan segera mengklarifikasi kerja dengan Kementerian BUMN membahas usulan PMN itu. "Kita akan lihat dulu dot ketersediaan dana di APBN, cukup atau nggak," katanya kepada Bisnis. Heri mengatakan pembayarnya akan mempelajari usulan PMN tersebut.

► PMN tunai Rp39,45 triliun untuk 25 BUMN dan PMN non-tunai Rp3,67 triliun untuk delapan BUMN.

► BUMN yang meminta PMN paling besar adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) senilai Rp8 triliun.

Menurutnya, rencana bisnis dari perusahaan yang diusulkan menerima PMN itu harus jelas penggunaannya.

Ekonom Indef Enmy Sri Hartati mengatakan pemerintah perlu memuat kriteria yang jelas bagi BUMN penerima PMN. "Kalau BUMN sehat, dia akan memiliki kredibilitas yang bagus di mata lembaga pembiayaan. Sehingga proyeknya bisa dipelototi oleh lembaga pembiayaan, bukan hanya oleh pemerintah," katanya. ■

Pemerintah dengan dalih mewujudkan agenda pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, 29 BUMN meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp. 43.12 Triliun dalam rancangan APBN 2016

Hashtag Berita :

#RencanaKerjaPemerintah #APBN #MoneterKeuanganNegara #PenyertaanModalNegara #BadanUsahaMilikNegara #PelaksanaanProgram

► PERTUMBUHAN KELAS MENENGAH

Asean Bergantung Integrasi Ekonomi

JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi empat negara Asean yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina diperkirakan bergerak di kisaran 4% per tahun dalam lima tahun ke depan bahkan bisa 6% jika melakukan integrasi ekonomi.

Yudi Supriyanto & Lutfi Zeenudin
redaksi@bisnis.com

Managing Director Otoritas Moneter Singapura (Monetary Authority of Singapore/MAS) Ravi Menon mengatakan pertumbuhan ekonomi empat negara Asean bisa lebih tinggi jika berhasil menerapkan reformasi struktural.

"Selain reformasi struktural dalam negeri, faktor kunci mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi agar lebih tinggi adalah integrasi ekonomi," katanya dalam situs resmi MAF akhir pekan lalu.

Selain itu, Menon melanjutkan "kendaraan" utama bagi keempat negara tersebut untuk mencapai integrasi ekonomi tersebut adalah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

MEA, katanya, diadopsi pada 2007 oleh para pemimpin Asean sebagai cetak biru atau *blueprint* agar terjadi perdagangan

► Integrasi keuangan Asean diyakini memberikan manfaat besar bagi perekonomian.

► Jumlah kelas menengah di Asean diperkirakan 400 juta orang pada 2020.

gan tanpa hambatan untuk barang, jasa, investasi, dan orang-orang yang terampil di kawasan ini.

Mengenai cetak biru tersebut, Menon mengatakan, saat ini telah tercapai kemajuan yang cukup substansial. Lebih dari 90% hal-hal kunci yang ditargetkan selesai pada 2015 telah dilaksanakan.

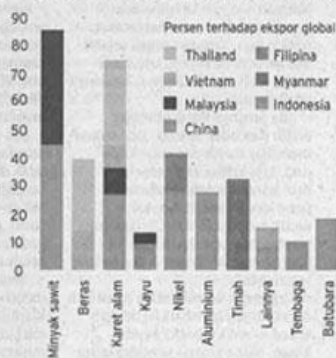
Nantinya, hampir semua barang yang diperdagangkan dalam Asean berada pada tarif nol, dan "Ada kesepakatan untuk meningkatkan perlindungan bagi investor, sektor liberalisasi untuk investasi, dan memberikan transparansi yang lebih besar pada aturan investasi," tambahnya.

Secara keseluruhan, yang menjadi komponen kuat dalam integrasi perdagangan dan merupakan komponen penting dalam proyek MEA adalah integrasi keuangan.

Menon menambahkan integrasi keuangan Asean akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian Asean seperti mendukung pertumbuhan ekonomi karena surplus tabungan dapat termobilisasi dengan lebih efisien dan tersalurkan ke sektor investasi yang produktif.

Selain itu, integrasi Asean juga dapat memperkuat ketahanan dari gejolak eksternal karena dapat memperdalam dan memperluas pasar modal. Sebagian

Kontribusi Ekspor Komoditas Sejumlah Negara terhadap Ekspor Global (%)*



Sumber: Bank Dunia, *Global Economic Prospects*, Juni 2015

masyarakat yang selama ini tidak dapat mengakses layanan keuangan juga dapat menikmatinya.

Dalam jangka menengah dan panjang, dia mengatakan produk domestik bruto (PDB) gabungan Asean bisa menjadi yang tercepat di antara kawasan lainnya di dunia. Pada tahun lalu, PDB Asean mencapai US\$2,5 triliun.

KONTRIBUSI KOMODITAS

Bank Dunia beberapa waktu lalu memproyeksikan pertumbuhan global pada tahun ini mencapai 2,8% lebih rendah

dari perkiraan sebelumnya 3%. Adapun, untuk negara-negara berkembang pertumbuhan tahun ini menjadi 4,4%.

Untuk kawasan Asia Pasifik di luar China, Bank Dunia dalam *Global Economic Prospects* yang diterbitkan pada Juni 2015, memprediksi pertumbuhan ekonomi mencapai 4,9% pada 2015 dan 5,4% pada 2017 yang didorong oleh perekonomian Asean.

Sebagian besar negara anggota Asean mengandalkan pertumbuhan ekonominya dari ekspor beberapa komoditas seperti minyak sawit, beras, kayu, timah, dan gas. Perkembangan harga beberapa komoditas itu ikut menentukan prospek ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, prospek pertumbuhan ekonomi tersebut juga diimbangi dengan perbaikan distribusi kesejahteraan di antara negara-negara Asean. Berdasarkan perhitungan Nielsen, jumlah penduduk di Asia Tenggara yang masuk dalam definisi kelas menengah mencapai 190 juta orang dengan kemampuan belanja di kisaran US\$16 dan US\$100 per hari.

Perbaikan distribusi kesejahteraan di kawasan itu diperkirakan terus berlangsung hingga 2020 dengan jumlah kelas menengah pada saat itu mencapai 400 juta orang. □

Pertumbuhan ekonomi empat negara asean yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipinan diperkirakan akan bergerak dikisaran 4% per tahun dalam lima tahun kedepan bisa mencapai 6% jika melalukan integrasi ekonomi

Hashtag Berita :

#MasyarakatEkonomiAsean

#EkonomiGlobal

#ProdukDomestikBruto

#StabilitasEkonomiIndonesia #PertumbuhanEkonomiNasional #DayaBeliMasyarakat

DEFISIT APBN

H A R I A N E K O N O M I NERACA

Senin, 15 Juni 2015

Defisit APBN

Oleh: Prof. Firmanzah, PhD
Rektor Universitas Paramadina
Guru Besar FEB Universitas Indonesia

Dalam APBN-P 2015 ditetapkan defisit fiskal sebesar 1,9% atau senilai Rp 222,5 triliun. Besaran defisit ini dengan asumsi total pendapatan negara sebesar Rp 1.761,5 triliun dan total belanja negara sebesar Rp 1.984,1 triliun. Defisit fiskal yang telah disepakati oleh Pemerintah-DPR masih dalam koridor aman dan di bawah ketentuan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana di lampiran penjelasan ditetapkan batas maksimum defisit fiskal sebesar 3% dan jumlah pinjaman maksimum sebesar 60% dari PDB.

Namun seiring dengan perlambatan perekonomian nasional yang pada kuartal I-2015 hanya mampu tumbuh sebesar 4,71% akan meningkatkan risiko tidak tercapainya pendapatan negara seperti yang telah ditetapkan. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak, realisasi penerimaan pajak pada kuartal I-2015 hanya sebesar Rp 198,2 triliun. Angka ini mencerminkan realisasi penerimaan pajak sebesar 15,32% dari target penerimaan pajak yang dipatok sebesar Rp 1.294,2 triliun dalam APBN-P 2015.

Sementara kalau kita bandingkan dengan kuartal I-2014, realisasi tahun ini masih di bawah capaian tahun lalu. Dimana pada periode yang sama tahun lalu, negara menerima pendapatan pajak sebesar Rp 264,4 triliun atau 19,2% dari target penerimaan pajak waktu itu yang ditetapkan Rp 1.380 triliun. Menurunnya realisasi penerimaan pajak pada kuartal I-2015 menciptakan kekhawatiran sejumlah pihak akan meningkatnya defisit fiskal dengan asumsi kita dapat membelanjakan anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P 2015.

Dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi akan memengaruhi realisasi penerimaan pajak nasional yang selama ini menjadi sumber utama penerimaan negara. Kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah dapat memangkas belanja pemerintah atau menutupi kekurangan melalui skema pinjaman atau penerbitan surat utang negara (SUN). Memangkas belanja pemerintah seperti akan berisiko di saat kita semua semakin membutuhkan stimulus dan dorongan belanja pemerintah untuk menggaikahkan perekonomian nasional. Oleh karenanya, di sejumlah kesempatan Menteri Keuangan juga telah memberikan keterangan dengan melihat realisasi penerimaan pajak diperkirakan defisit fiskal membengkak dan berada dalam kisaran 2,2%-2,3%.

Skema penerbitan SUN seperti ini masih akan menjadi sumber pembiayaan untuk menutupi kekurangan anggaran pemerintah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DIPPR) nominal realisasi penerbitan SUN per Mei 2015 mencapai Rp 150 triliun dengan rincian Rp 100 triliun dalam bentuk SUN domestik dan Rp 50 triliun merupakan SUN valas. Sementara kebutuhan penerbitan SUN gross tahun ini mencapai Rp 452 T.

Selain itu juga, pemerintah masih memiliki sejumlah skema untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan melalui skema pinjaman baik yang bersifat bilateral maupun dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan ADB. Namun apapun sumber pembiayaan untuk menutupi kekurangan penerimaan dari sektor perpajakan kita berharap defisit fiskal dapat terus dijaga dalam koridor yang aman.

Pemerintah dalam APBN-P 2016 ditetapkan defisit anggaran sekitar 1,95 atau senilai Rp 222.5 triliun. besaran defisit anggaran ini dengan asumsi total pendapatan negara dan total belanja negara

Hashtag Berita :

#MoneterKeuanganNegara

#APBN

#StabilitasEkonomiIndonesia

#PertumbuhanEkonomiNasional #DefisitAnggaran

NERACA

Senin, 15 Juni 2015

PENYEBAB UTAMANYA KEMISKINAN

FAO: 19 JUTA PENDUDUK KELAPARAN

Jakarta - Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, merilis data tentang ketahanan pangan di Indonesia. Menurut lembaga internasional itu, sebanyak 19,4 juta penduduk di Indonesia masih kelaparan setiap hari. Selain itu, 28% dari penduduk yang kelaparan menderita kekurangan berat badan dan 42% kekurangan gizi.

■ NERACA

Dibanding dengan Filipina dan Kamboja, Indonesia masih menghadapi beban ganda malnutrisi dimana angka balita pendek yang masih tinggi. Padahal, dari sisi ekonomi, Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan kedua negara tersebut.

"Isu ketahanan pangan masih penting dan relevan untuk dikaji lebih lanjut karena ini adalah salah satu tantangan besar Indonesia," ujar peneliti kebijakan pangan dari Crawford School of Public Policy, Australian National University, Prof. Dr John F. McCarthy saat seminar di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Yogyakarta, baru-baru ini.

Menurut dia, adanya wacana swasembada pangan yang diadegankan pemerintah untuk menekan jumlah penduduk yang kelaparan dinilai belum mampu mengatasi permasalahan tersebut. Dia mengatakan, Indonesia mungkin mampu kembali swasembada pangan namun program tersebut belum mampu mencapai terwujudnya akses pangan.

"Apakah cukup membantu mencapai hak pangan yang memadai? Mungkin baik untuk mengejar target produksi namun program tersebut belum tentu bisa memberi akses bagi petani miskin, apalagi jika dikombinasikan oleh perkebunan besar," ujar McCarthy.

Berdasarkan hasil penelitian terakhir dari Organisasi Pangan Dunia (FAO), diperkirakan sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan. Penyebab utamanya adalah kemiskinan. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, khususnya penduduk di wilayah bagian timur Indonesia.

Kondisi Pangan

Kami memperkirakan di Indonesia masih ada 20 juta atau 19,4 juta orang yang kelaparan setiap hari. Ini artinya mereka tidak me-

miliki cukup makanan untuk di makan. Ini angka yang besar namun sudah jauh berkurang dibandingkan awal tahun 90-an saat kami mulai menghitung target pembangunan millennium," ujar Kepala Perwakilan FAO Indonesia, Mark Smulders, seperti dikutip VOA Indonesia, akhir pekan lalu.

Meski demikian, FAO menilai Indonesia telah cukup berhasil dalam menurunkan angka kelaparan dari tahun-tahun sebelumnya. Indonesia telah berhasil menurunkan angka kelaparan hingga setengahnya, ini sangat bagus, tapi masih banyak yang harus dilakukan khususnya di wilayah bagian timur Indonesia seperti Papua Barat, NTT, Maluku dan sebagian Kalimantan, yang masih terdapat penduduk yang tidak memiliki makanan yang cukup.

Adapun persentase penduduk Indonesia yang kelaparan, turun dari 19,7% di tahun 1990-1992, menjadi hanya 7,9% di tahun 2014-2016. Pertumbuhan ekonomi yang pesat membuat Indonesia menurunkan angka kelaparan.

Selama beberapa tahun terakhir, memang angka kelaparan dunia dilaporkan menurun. Beberapa negara berkembang mampu memperbaiki kondisi pangan di dalam negeri. Sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara pun mampu membuat kemajuan pesat. Brunei Darussalam dan Malaysia misalnya, mampu mengurangi prevalensi angka kelaparan (*prevalence of undernourishment*) hingga di bawah ambang batas 5%. Sebaliknya, menurut McCarthy, Indonesia menghadapi tiga isu pangan yang kompleks karena tumpang tindih dengan persoalan lain menurut McCarthy. Pertama, kekhawatiran akan jumlah produksi domestik yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga sangat bergantung pada impor yang harganya fluktuatif di pasaran internasional. Kedua, naiknya permintaan komoditas pertanian, terutama kelapa-

sawit. Ketiga, Indonesia telah menyatakan komitmennya terhadap program ekonomi hijau dan pembangunan perdesaan rendah emisi.

"Lalu bagaimana kebijakan untuk merespon ketiga isu tersebut bisa berjalan selaras sementara masing-masing punya capaian yang berbeda bahkan berseberangan," ujarnya.

Ada lima paradigma di dalam kebijakan pangan menurut McCarthy. Pertama, swasembada pangan (*food self-sufficiency*) sebagai upaya mencapai angka produksi global. Kedua, ketahanan pangan (*food security*) yang menurut FAO bisa dicapai dengan memperkuat kapasitas penduduk untuk mengakses pangan terutama saat menghadapi rawan pangan dan masa paceklik. Ketiga, kedaulatan pangan (*food sovereignty*), yakni dengan membantu petani maupun kelompok tani untuk memiliki akses dan kontrol yang lebih baik atas sumber-sumber pertanian. Keempat, kebijakan pangan perlu mengarah pada pencapaian hak atas ketersediaan pangan yang memadai sesuai dengan amanat dalam perjanjian internasional dan kelima, pemer-

hatikan prinsip-prinsip lingkungan.

Belakangan, Indonesia meletakkan fokus utamanya pada satu pendekatan saja, yakni swasembada untuk beragam capaian kebijakan pangannya. Seperti banyak diberitakan oleh media massa, pemerintah gencar meningkatkan produksi, misalnya melalui program *food estate*. Pembukaan lahan baru melalui pertanian berbasis besar dianggap bisa mencapai tujuan swasembada.

Di tempat yang sama, pakar ekonomi pertanian PSKK UGM Jukung Handoyo Mulyo mengatakan, mandiri di bidang pangan adalah hal penting. Program ketahanan pangan harus diorientasikan menuju kemandirian pangan karena itulah prasyarat untuk mencapai kedaulatan pangan dan kemakmuran bangsa.

Negara yang berdaulat pada piliannya memiliki daya saing dan posisi tawar sehingga mampu "diduk-sama rendah, beerdit sama tinggi" dalam tawar gaul dunia.

Saat ini pemerintah memang lebih gencar menerapkan kebijakan untuk meningkatkan produksi. Program mencetak lahan sawah, pembangunan waduk,

pengadaan mesin traktor serta subsidi pupuk dan benih pada dasarnya merupakan upaya perbaikan pasokan atau suplai pangan.

Namun menurut Jukung, pembangunan dalam skala besar seperti mencetak lahan sawah dan membangun waduk hampir tidak mungkin dilakukan tanpa risiko (*zero risk*). Maka, penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang bisa meminimalisir dampak negatif sehingga manfaat atau benefit yang dihasilkan dari pembangunan itu bisa maksimal.

"Untuk itu, harus dilaksanakan keidiah keidiah secara mendalam berbagai aspek, yaitu, aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Setiap aspek berkontribusi penting dalam menyimpulkan kelayakan suatu program," ujarnya.

FAO mencatat, negara-negara Asia Tenggara membuat kemajuan luar biasa untuk mengurangi kelaparan. Selama 25 tahun, jumlah penduduk yang kelaparan berkurang setengahnya. www.neraca.com



JALAN TOL TERPANJANG : Sejumlah kendaraan mencoba melintasi Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) di Jawa Barat, Sabtu (13/4). Penggunaan jalan tol terpanjang se-Indonesia dengan jarak 116 kilometer itu akan dibuka untuk umum mulai Senin (15/6) mendatang.

Organisasi Pangan dan Pertanian dalam dunia (FAO) merilis data tentang ketahanan pangan di Indonesia, menurut lembaga internasional itu, sebanyak 19,4 juta penduduk di Indonesia masih kelaparan setiap hari

Hashtag Berita :

- #KetahananPanganNasional
- #KrisisPanganInternasional
- #KedaulatanPanganNasional
- #Kependudukan
- #SwasembadaPangan
- #BadanUrusanLogistik
- #KementerianPertanian
- #KementerianPerdagangan

H A R I A N E K O N O M I

NERACA

Senin, 15 Juni 2015

Infrastruktur Perlu Dukungan Positif

Oleh : Fajri Permana, Pengamat Masalah Kebangsaan

Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kemajuan bangsa. Bahkan sebagaimana disampaikan Presiden RI Joko Widodo di berbagai kesempatan, kemajuan infrastruktur menjadi bagian dari 9 agenda prioritas atau Nawa Cita dari Kabinet Kerja. Untuk bisa memenuhi target tersebut segala daya, upaya, serta sumber daya harus dipergunakan secara maksimal. Tantangan utama bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah sejauh mana para penyelenggara negara berkomitmen untuk mengatasi gap dalam pembangunan infrastruktur.

Rendahnya investasi di bidang infrastruktur akan berdampak pada rendahnya daya saing dan proses produksi negara tertentu yang berdampak pada terciptanya ketidakadilan dalam distribusi sosial. Rencana Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia serta rekomendasi inisiatif dan alternatif pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, sebagai kunci pertumbuhan ekonomi di sebuah wilayah atau negara (Infrastructure Driven Regional & National Economic Development).

Pembangunan infrastruktur nasional ini dilaksanakan dalam kerangka implementasi MP3EI. Hal tersebut didukung oleh kebijakan-kebijakan serta melalui program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan

Pencapaian program infrastruktur ditempuh melalui berbagai lini jalur yang mengkolaborasi berbagai Kementerian terkait dengan bidang pembangunan infrastruktur utama. Pemerintah mendukung peran serta swasta dalam pendanaan investasi infrastruktur. Hal ini dilandasi oleh berbagai peraturan pemerintah mengenai kerjasama public-private partnership melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Pendanaan menjadi syarat penting pembangunan infrastruktur, terlebih daya dukung pendanaan publik yang kurang memadai mengartikan dukungan sektor swasta menjadi vital.

Oleh sebab itu, diperlukan suatu revolusi perilaku bisnis publik yang efektif dan efisien untuk dapat melibatkan sektor swasta dalam investasi pembangunan infrastruktur Indonesia. Selain itu, pembangunan infrastruktur nasional merupakan Prioritas Nasional, hal ini disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagai salah satu fokus dari prioritas nasional Indonesia. Hal ini didasarkan pada berbagai alasan meliputi percepatan pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai tanpa difasilitasi oleh infrastruktur nasional, revitalisasi pertanian memerlukan dukungan infrastruktur untuk dapat mengakses pasar komoditas agrikultural, tanpa adanya infrastruktur masyarakat miskin akan terisolasi dari kegiatan perekonomian, masalah lingkungan terkait dengan

udara dan tanah juga terkait dengan ketiadaan infrastruktur yang memadai.

Karena itu, investasi di bidang infrastruktur menjadi prioritas pembangunan Indonesia melalui peningkatan kerja sama pendanaan antara pemerintah dan komunitas bisnis. Dalam rangka mengoptimalkan dukungan pembiayaan infrastruktur, diperlukan kerja sama yang sinergis dan terintegrasi antar semua pelaku sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Inovasi Pendanaan

Rencana Presiden Joko Widodo membangun infrastruktur pernah disampaikan di dalam konferensi APEC CEO di Beijing. Rencananya, tiap pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua akan dibangun jaringan rel kereta 1.000 km. Dengan demikian, secara total akan ada 4.000 km dibangun selama 5 tahun, dengan kebutuhan anggaran Rp120 triliun. Juga akan dibangun tol laut yaitu konektivitas transportasi laut dari ujung Barat Indonesia (Medan) sampai ujung Timur Indonesia (Merauke), sesuai rencana koridor ekonomi pendulum transportasi laut dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI).

Rencana besar tersebut, perlu masyarakat Indonesia apresiasi karena Presiden Jokowi memiliki para Menteri yang kompeten dan para staf ahli yang profesional untuk

nya, meskipun masih perlu diperjelas sistem pendanaan dan kebijakan pendukungnya. Metode pendanaan infrastruktur yang sudah berjalan saat ini di Indonesia adalah didanai dari APBN apabila bersifat public service obligation (PSO) terutang pada pembangunan infrastruktur bersifat sosial yaitu yang tidak layak secara financial, mempunyai kelayakan ekonomi yang kecil, tetapi keberadaan infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.

Tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah pembebasan tanah. Secara teknis, diperlukan survey yang lebih detail untuk memastikan keberhasilannya. Sistem penentuan harga tanah di Indonesia adalah mengikuti harga pasar, bukan mengikuti sistem Tata Guna Lahan sehingga menyulitkan dalam standarisasi penganggaran. Apabila memakai sistem Tata Guna Lahan, maka Pemerintah masih memiliki kontrol karena jika fungsinya sama maka harganya sama.

Namun, harga bisa berbeda-beda di tempat yang berbeda jika memakai mekanisme harga pasar. Contohnya, Australia. Negara ini mengacu sistem Tata Guna Lahan. Tanah pertanian 1 hektar di Queensland, Darwin, dan Perth akan sama harganya karena fungsinya sama sebagai tanah pertanian. Namun, jika memakai harga pasar, harga 1 hektar tanah di Jawa tentu lebih mahal daripada harga tanah di Sumatera maupun Kalimantan. Hal inilah yang

mengontrol harga tanah untuk pembangunan infrastruktur.

Mengutamakan kepastian perolehan lahan sesuai dengan rencana awal adalah hal yang harus diutamakan dalam pembangunan infrastruktur karena sifat tanah yang amortif yang akan naik terus dari tahun ke tahun. Jadi, apabila dalam rencana diperlukan tanah seluas 100 meter, tetapi dibebaskan baru 60 meter, maka sisanya yang 40 meter harganya bisa melonjak drastis. Ujung-ujungnya, investasi yang ditanamkan bisa terbengkalai. Hal yang perlu dihindari dalam membangun infrastruktur adalah ketergantungan pada pihak atau Negara lain. Jangan sampai infrastruktur Indonesia pendanaannya di kuasai oleh Negara tertentu seperti Cina, Jepang, Amerika, atau lainnya.

Selain itu, BUMN yang akan ditunjuk membangun infrastruktur perlu diisi para profesional, bukan dari kalangan partai karena risiko politiknya terlalu besar. Jika hal itu terjadi, dikhawatirkan penjumlahan obligasi tidak laku, laku tetapi murah, terjual sedikit dan mahalnya biaya operasional. Bahkan, jika terjadi default, Indonesia tidak dipercaya lagi di pasar modal internasional dan dapat menjadikan Negara mengalami kemunduran dalam bidang ekonomi.

Dengan demikian, diperlukan kehati-hatian yang tinggi untuk menciptakan management yang profesional dalam mengelola penerbitan obligasi untuk infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kemajuan bangsa dan negara. bahkan sebagaimana mestinya pemerintah menyampaikan bahwa kemajuan infrastruktur menjadi bagian dari 9 agenda nasional didalam Nawa Cita dari kabinet kerja pemerintah

Hashtag Berita :

#RencanaKerjaPemerinta #PembangunanDaerah #StabilitasEkonomiIndonesia #NawaCita
 #MasterPlanPercepatanPerluasanPembangunanEkonomiIndonesia #APEC #RPJMN
 #PertumbuhanEkonomiNasional